

EVALUASI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BADUNG DALAM BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN 2014

Ketut Suartini¹, Piers Andreas Noak², I Ketut Winaya³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: ketut.suartini@yahoo.com¹, andreas.noak@yahoo.com²,
ketutwinaya14@yahoo.com³

ABSTRACT

Indonesia has been worldwide known as a high risk country for natural disaster. Any potential natural disasters can happen in this country. However, in the disaster management, especially in the prevention and preparedness, Indonesia is a low category country. Following that problem, the writer interested in doing a research with the subject "Evaluation to the Performance of BPBD - Prevention and Preparedness Section at Badung Regency of Bali Province in the year of 2014. This research use the kualitatif descriptive methodology. And this research is using the Performance Theory by Agus Dwiyanto. To Obtain the data, the writer do some direct observation on fields and also do some deeply interviews with the reliable source which related to the performance of the BPBD Badung. From the Observation and the interviews, the writer found that generally the performance of BPBD Badung is good. It works well because of the great supporting elements but it is unavoidable there are some resister elements. Comes from that, BPBD Badung was expected to be more creative and inovatif in increasing their performance. They also need to increase their productivity, quality service, responsivity, responsibility and accountability to obtion excellent performance in accordance with LAKIP BPBD Kabupaten Badung. The use of any available resource is expected to be well and wisely. So finally the disaster reduction with society based achieved and to create a tough and reliable Badung.

Keywords: Evaluation, Performance, Disaster prevention and preparedness.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam menyikapi keadaan geografis wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, berbagai wilayah di Indonesia memiliki ancaman terhadap terjadinya suatu bencana. Indonesia juga dikenal sebagai negara paling rawan bencana dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Hal ini didukung oleh salah satu Badan PBB yang membidangi strategi internasional pengurangan resiko bencana yaitu UNISDR (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction*). Menurut badan ini, Indonesia menduduki peringkat teratas untuk beberapa jenis bencana alam yang dilihat dari jumlah korban meninggal

dunia akibat bencana tersebut. Melihat dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lainnya di dunia. Maka dari itu, Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia perlu dilaksanakan. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Badung.

Beberapa tahun terakhir ini hampir seluruh wilayah di Kabupaten Badung mengalami bencana. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada aspek perekonomian dan aspek psikologi korban bencana tersebut, serta tentunya memerlukan suatu upaya penanggulangan bencana. Pemerintah Pusat telah membuat suatu kebijakan publik dalam

upaya penanganan penanggulangan bencana yaitu dengan membentuk suatu badan nasional yang membidangi penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Sementara, karena Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan ini memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah. Pembentukan Badan dilaksanakan karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana. Kabupaten Badung telah memiliki pula BPBD yang berdiri sejak tahun 2011, dimana pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Badung dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana terjadi. Melihat potensi bencana di Kabupaten Badung, keberadaan pelayanan pra/sebelum bencana sangat penting. Hal ini karena dengan penyelenggaraan pelayanan sebelum bencana ini, setidaknya ada tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana.

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat kendala sehingga hasil yang diinginkan belum maksimal. Maka dari itu, dalam manajemen pemerintahan di BPBD Kabupaten Badung, perlu melakukan suatu evaluasi kinerja, dimana selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya keberhasilan BPBD dalam pelaksanaan pelayanan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan seberapa efektifkah kinerja BPBD selama ini serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam menjalankan pelayanan tersebut.

Berdasarkan uraian dari kondisi tersebut diatas, maka penelitian ini secara khusus akan mendeskripsikan tentang evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan termasuk pula faktor pendukung maupun penghambat kinerja yang ditemui pada tahun 2014, dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana tahun 2014?
- Apa saja Faktor pendukung dan penghambat kinerja yang ditemui BPBD Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana tahun 2014?

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Suatu negara memerlukan suatu kebijakan dalam menjalankan suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah ditentukan. Menurut James E. Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (1984:3) (dikutip Dalam Soenarko, 2003:42) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik atau lebih dikenal dengan kebijakan pemerintah ini kemudian akan dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintahan yang ada.

Evaluasi

Evaluasi sering dikenal sebagai suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas atau proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil atau dampak tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bagaimana cara pencapaiannya. Evaluator atau orang yang melakukan evaluasi biasanya menggunakan tipe kriteria yang berbeda-beda dalam melakukan evaluasi, yang nantinya dapat

menghasilkan suatu informasi mengenai kinerja program/kegiatan. Menurut Dunn (1999), dalam mengevaluasi setidaknya sesuai dengan beberapa tahapan seperti berikut ini yaitu: 1. Pengumpulan data, dalam tahapan ini evaluator melakukan pengumpulan data yang diinginkan baik yang berhubungan dengan keadaan awal, transaksi atau proses dan hasil suatu kegiatan/program. 2. Analisis Data, dalam tahapan ini hal yang dilakukan adalah analisis logis dan analisis empirik. 3. Analisis Congruence, dalam tahapan ini dilakukan analisis kesesuaian dengan cara membandingkan antara tujuan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan (observasi), sehingga dapat diukur kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan. 4. Pertimbangan Hasil, dalam tahapan ini evaluator selanjutnya memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji, sehingga evaluator harus mengetahui standar program yang diteliti dan kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana. Konsep evaluasi ini nantinya akan diaplikasikan kepada penelitian yang akan dilaksanakan di BPBD Kabupaten Badung mengenai kinerja badan ini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung.

Kinerja

Kinerja (Kinetika hasil kerja) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *performance* adalah hasil kerja dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang dilakukan secara legal, sesuai moral dan etika serta tidak melanggar hukum yang berlaku.

Konsep Organisasi Pemerintahan

Pemerintah sebagai makhluk sosial, manusia akan cenderung masuk dan bergabung dalam suatu organisasi. Banyak terdapat pakar yang mendefinisikan tentang organisasi. Menurut John D. Millet (1954), menyatakan bahwa organisasi merupakan kerangka struktural yang didalamnya terdapat pekerjaan dari

beberapa orang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu menurut Chaster L. Bernard (1968), menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai sebuah sistem yang menyangkut aktivitas kerja sama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Di dalam suatu negara organisasi pemerintahan menjadi hal utama dalam mewujudkan tujuan – tujuan pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat. Disamping itu, untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dimana dibentuk oleh masing-masing daerah yang berdasarkan pada pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan di daerah tersebut. Perangkat daerah di kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dan badan.

Penelitian ini akan lebih banyak membahas mengenai organisasi perangkat daerah kabupaten yaitu Badan. Badan yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung.

Pelayanan Penanggulangan Bencana

Pelayanan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pula. Untuk memahami pelayanan penanggulangan bencana, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang bencana. Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat umum yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Sementara itu, penanggulangan bencana berkaitan erat dengan serangkaian upaya untuk

menghindari dan/atau mengurangi akibat yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana. Dalam Undang - Undang No 24 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa "Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi." Dari penjelasan di atas maka bentuk-bentuk pelayanan penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi tiga jenis. Begitu pula yang terdapat di BPBD Kabupaten Badung. bentuk pelayanan tersebut yaitu: Pelayanan Pra Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan Saat Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan Pasca Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Badung. Pada dasarnya pelayanan ini berkesinambungan dari pelayanan pra, saat dan pasca bencana.

Dalam penelitian ini, akan lebih banyak membahas mengenai pelayanan sebelum bencana, dimana termasuk didalamnya pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa "Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana." Sementara itu, Kegiatan Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Teori Evaluasi Kinerja Organisasi

Organisasi berkinerja tinggi dapat diwujudkan dengan melaksanakan tahap evaluasi kinerja organisasi yang biasanya dilaksanakan di akhir tahapan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk dapat menilai dan mengukur kinerja

organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Chaizi Nasucha dalam Irham (2013;3) menyatakan bahwa Kinerja Organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi yang dicapai secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan yang menyangkut usaha yang sistematis dan untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus guna mencapai kebutuhan yang efektif. Amins (2009: 91-99), mengemukakan bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu tahapan akhir kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis efisiensi dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi suatu kegiatan, serta dilakukan pula penentuan tingkat efektivitas yang dapat menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan, hasil, manfaat dan dampaknya. Evaluasi kinerja juga dilaksanakan berdasarkan hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja adalah hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja tertentu dalam suatu organisasi. sehingga antara penilaian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kinerja organisasi berjalan baik atau buruk. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) terdapat lima indikator dalam mengukur kinerja organisasi khususnya dalam birokrasi publik, diantaranya yaitu: 1. Produktivitas, dimana indikator ini mengukur kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik. 2. Kualitas layanan, dimana dengan melihat kualitas pelayanan publik dalam menjalankan suatu birokrasi, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja. Apabila masyarakat telah merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan maka kualitas layanan tersebut dapat dikatakan baik, namun apabila masyarakat belum puas maka kualitas layanan kurang baik. 3. Responsivitas, dimana dengan indikator ini dapat mengukur kinerja dengan melihat kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan

menangkap kebutuhan publik. Hal ini dilihat dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta penyusunan program maupun kegiatan yang berdasarkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

4. **Responsibilitas**, dimana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kinerja birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan birokrasi yang telah ditetapkan.

5. **Akuntabilitas**, dimana indikator ini dapat menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dengan indikator ini dapat digunakan untuk melihat seberapa tingkat konsistensi dari kebijakan dan kinerja birokrasi publik terhadap kehendak publik. Adanya indikator-indikator di atas maka kinerja organisasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. pelaksanaan evaluasi kinerja ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, c. Kinerja suatu organisasi dengan kinerja organisasi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta, d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. dalam penelitian ini, dalam mengevaluasi kinerja BPBD Kabupaten Badung akan lebih menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung ini

menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif, dimana metode kualitatif ini dapat menghasilkan data-data deskriptif yang bersumber dari narasumber dan pelaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut tentang fenomena atau gejala sosial yang menitikberatkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji. Peneliti melakukan penelitian di BPBD Kabupaten Badung khususnya di Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan pada bulan januari hingga maret 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan teknik dari Nonprobability Sampling yaitu Snowball Sampling dalam menentukan informan penelitian ini, dimana dalam teknik ini sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar sesuai dengan kebutuhan informasi. Penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014 Evaluasi kinerja merupakan tahapan akhir yang perlu dilakukan oleh suatu manajemen organisasi atau badan untuk mengetahui bagaimana penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Begitu pula yang perlu dilakukan BPBD Kabupaten Badung. Sebagai Badan baru di Pemerintahan Kabupaten Badung hal ini penting dilakukan. Membahas tentang evaluasi kinerja, maka yang perlu diperhatikan adalah kinerja itu sendiri.

Kinerja inilah yang dinilai, diukur dan dievaluasi sehingga nantinya dapat dilihat tingkat keberhasilan dari suatu organisasi tertentu. Untuk tahun 2014, adapun kinerja dari BPBD Kabupaten Badung dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Badung. Dari kegiatan ini, maka hasil yang dicapai antara lain meningkatnya pengetahuan 900 orang siswa/siswi (SD, SMP, SMA/Sederajat) tentang kebencanaan di Kabupaten Badung sehingga para siswa tersebut diharapkan dapat memahami dan dapat mengembangkannya di sekolah, yang nantinya dapat membantu dalam pengurangan resiko bencana. Selain itu, dari kegiatan ini telah tercetaknya buku informasi kebencanaan (Buku Saku Tanggap, Tangkas dan Tangguh Menghadapi Bencana) yang dapat dipelajari oleh para siswa. 2. Bimbingan Teknis Dan Pembekalan Pengetahuan Dasar Anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) Kabupaten Badung. Dari kegiatan ini, hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 45 orang anggota TRC dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan respon dengan baik dan benar saat terjadi bencana. 3. Penyusunan Rencana Evakuasi Tsunami di Kabupaten Badung. Hasil dari kegiatan ini diantaranya yaitu: a. Terwujudnya peta evakuasi tsunami di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan, Desa Tibubeneng, Desa Pererenan, Desa Canggu, Desa Munggu, Desa Cemagi, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Desa Pecatu b. Terpasangnya 26 buah papan informasi dan 52 buah rambu evakuasi tsunami di 13 desa/kelurahan yang berpotensi terkena dampak bencana tsunami di Kabupaten Badung c. Tercetaknya brosur/liflet prosedur evakuasi tsunami di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan, Desa Tibubeneng, desa Pererenan, Desa Canggu, Desa Munggu, Desa Cemagi, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Desa Pecatu 4. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dari kegiatan ini hasil yang dicapai diantaranya: a. Terbentuknya 2 Kelurahan Tangguh Bencana yaitu Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Kedonganan. b. Tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Kedonganan. c. Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Kedonganan. d.

Terlaksananya gelar pasukan dan simulasi penanggulangan bencana dalam memperkuat kelurahan tangguh bencana. 5. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Kabupaten Badung. Kegiatan ini hasil yang dicapai adalah tercetaknya buku informasi kebencanaan (buku saku tanggap, tangkas dan tangguh menghadapi bencana), brosur/liflet prosedur evakuasi tsunami Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan dan profil BPBD Kabupaten Badung. Dari penjabaran kinerja diatas dapat dilihat bahwa, tanggung jawab BPBD dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di tahun 2014 telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengamatan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kinerja dari bidang ini tergolong cukup baik karena hampir semua kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana dan standar operasional prosedur serta standar pelayanan yang berlaku. Hubungan antar pegawai juga terjalin dengan baik sehingga pegawai bekerja dengan semangat dan kinerjanya baik pula. Selain mengevaluasi dari internal BPBD Kabupaten Badung sendiri, opini masyarakat juga mempengaruhi penilaian dan masukan kepada Badan ini. Masyarakat dari berbagai kalangan berhak memberikan penilaian terhadap kinerja suatu badan atau organisasi pemerintahan. Dari pengamatan di lapangan terutama di daerah pesisir pantai, beberapa masyarakat berpendapat bahwa papan informasi Tsunami dan jalur evakuasi yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Badung telah sangat membantu masyarakat yang beraktivitas di daerah pantai. Tokoh masyarakat dan pihak sekolah yang mengikuti sosialisasi juga sudah merasakan kinerja BPBD Kabupaten Badung yang cukup baik. Namun ada suatu hal yang masih dirasakan kurang ditengah-tengah masyarakat adalah gebrakan kegiatan yang kreatif dan inovatif yang masih kurang dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan/program yang telah dilakukan masih dirasakan kurang sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu informasi melalui sosialisasi maupun yang lainnya juga masih dirasakan belum

menyeluruh di seluruh kalangan masyarakat, sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan kembali.

Faktor pendukung dan penghambat kinerja BPBD Kabupaten Badung Kinerja BPBD Kabupaten Badung yang dicapai pada tahun 2014 tentunya dapat terwujud karena terdapat faktor-faktor yang mendukung kegiatan ini. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja belum dapat dikatakan maksimal karena tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih terdapat sedikit hambatan yang ditemui. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut yaitu:

Faktor Pendukung: a. Mendapat Kemudahan dari Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini karena Program Penanggulangan bencana menjadi program unggulan nomor 5 (lima) di Kabupaten Badung, sehingga mendapatkan perhatian yang lebih intensif baik dalam hal pelaksanaan program- programnya hingga pendanaannya. b. Terjalannya kerja sama dengan beberapa pihak swasta di daerah Badung Selatan. Seperti kita ketahui terdapat perkembangan industri pariwisata dari pihak swasta di daerah Badung Selatan, sehingga banyak terdapat fasilitas pendukung pariwisata seperti salah satunya hotel yang memiliki gedung-gedung tinggi. Dengan gedung yang tinggi ini maka dapat digunakan sebagai lokasi evakuasi vertikal (evakuasi ke atas tempat lebih tinggi). Pemilik hotel-hotel tersebut banyak yang telah mendukung BPBD Kabupaten Badung untuk diijinkan menjadikan gedung-gedung yang tinggi sebagai lokasi evakuasi vertikal apabila terjadi bencana seperti tsunami atau banjir. c. Yang mendukung lainnya adalah fungsi BPBD Kabupaten Badung itu sendiri. Fungsinya adalah sebagai Komando, Koordinasi dan Pelaksana, sehingga apabila dalam upaya penanggulangan bencana BPBD dapat mengarahkan dan memimpin instansi pemerintahan lainnya untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Instansi tersebut seperti TNI, BMKG, SKPD Kabupaten Badung, Dinas Sosial, PMI, Basarnas, dan lain sebagainya

yang dapat membantu dalam mengurangi resiko bencana.

Faktor Penghambat: a. Belum Optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Badung. Tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tentunya memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan. Namun menurut narasumber, walaupun sudah didukung oleh pemerintah sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Badung masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti contohnya adalah Sarana mobilitas yang belum lengkap, sarana komunikasi seperti HT (Handy Talkie) yang belum optimal. b. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi salah satu hambatan dikarenakan oleh tiga unsur yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Pemerintah, pihak swasta (dunia usaha) dan masyarakat belum optimal dalam mendukung kegiatan ini. Sinergitas unsur-unsur pendukung masih dirasakan belum maksimal, misalnya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk pengurangan resiko bencana, pihak swasta yang masih mengeksploitasi tanpa memikirkan dampak kedepannya. Hal sederhana seperti itulah yang sedikit menghambat pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Badung dalam upaya pencegahan bencana.

5. ANALISIS PENELITIAN

Mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana menurut Amins (2009) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja perlu dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan *output* dengan *input*. Terdapat pula serangkaian tahapan dalam mengevaluasi kinerja diantaranya Penilaian Kinerja, Pengukuran kinerja dan terakhir Evaluasi kinerja. Tahapan yang pertama adalah Penilaian Kinerja yang merupakan proses yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja pegawai atau sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi. Komponen dasar yang dinilai yaitu

Kuantitas Kinerja, Kualitas Kinerja, Biaya dan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Penulis melakukan penilaian kinerja dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan dalam mengevaluasi kinerja seperti Laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Badung Tahun 2011-2014, LAKIP BPBD Kabupaten Badung tahun 2014 dan tahun 2013, Renstra, Profil Organisasi (sejarah, Visi-misi, Tujuan dan lain sebagainya). Tahapan kedua adalah melakukan pengukuran kinerja, dalam mengukur kinerja yang perlu diperhatikan adalah Input, Output, hasil, manfaat dan dampaknya. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006:50) yang menjelaskan bahwa ada indikator pengukuran kinerja organisasi khususnya dalam birokrasi publik. Berikut ini adalah beberapa indikator yang ditentukan dalam konsep kinerja dan bagaimana hasil yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian: 1. Produktivitas, dengan mengukur kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan publik. Dari Pelaksanaannya, Penggunaan dana telah disesuaikan dengan survey pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana dengan Program Pencegahan dan peringatan dini, realisasi anggaran adalah 95,98 % dari Rp 549.655.600,00. Sisa anggaran Rp 22.105.900,00 atau sebesar 4,02% yang dapat diartikan sebagai persentase efisiensi dari 5 jenis kegiatan. Maka dari itu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran yang telah diberikan. BPBD Kabupaten Badung telah cukup efektif dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena tingkat capaian kinerja tahunan mencapai 100%, namun walaupun tingkat capaian indikatornya telah sesuai dengan rencana, hal ini tetap memerlukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh adalah pengawasan yang berkelanjutan terhadap tokoh masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi, apakah

sudah disalurkan informasi tersebut kepada masyarakatnya atau belum. Pengawasan terhadap kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, bagaimana keberlanjutan kegiatan yang dilakukan di kelurahan, agar nantinya tidak sekedar terbentuk tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan, sehingga kinerja dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat lebih efektif lagi. 2. Kualitas Layanan, dengan melihat kualitas pelayanan publik sehingga kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja birokrasi publik. Tahun 2014 BPBD Kabupaten Badung belum melaksanakan survey kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga kepuasan masyarakat dan kualitas layanan BPBD belum dapat diukur secara konkret. Selama ini dalam memberikan pelayanan, BPBD Kabupaten Badung melaksanakannya sudah disesuaikan dengan standar pelayanan yang ada. 3. Responsivitas, dimana hal ini terkait pada kemampuan untuk mengetahui dan menangkap kebutuhan yang dirasakan oleh publik yang dapat dilakukan dengan cara penyusunan agenda, prioritas pelayanan, dan penyusunan program sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Badung. Melihat potensi bencana yang terjadi yaitu Tsunami yang cukup tinggi, maka yang menjadi prioritas BPBD Kabupaten Badung tahun 2014 adalah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah pesisir wilayah Kabupaten Badung. Beberapa desa di wilayah pesisir ini juga telah dibentuk desa/kelurahan tangguh bencana sehingga masyarakat dapat diberdayakan dan diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk mengurangi resiko tsunami yang mungkin ditimbulkan. Daerah lainnya seperti di daerah pegunungan (Utara) Kabupaten Badung juga tetap mendapat perhatian BPBD. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mencapai pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat. Jadi tingkat Responsivitas BPBD Kabupaten Badung masih tergolong cukup tinggi. 4. Responsibilitas, berdasarkan hasil pengamatan Di BPBD Kabupaten Badung telah menerapkan prinsip – prinsip

administrasi yang benar. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, BPBD Kabupaten Badung telah memproses dengan cepat dan tepat, telah dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh instansi terkait yang mendukung hal tersebut. Secara teknis badan ini sudah transparan dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang ada, namun hal ini belum didukung dengan penggunaan internet berupa website untuk mempublikasikan segala laporan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat belum dapat dengan mudah mengaksesnya dimana saja dan kapan saja. 5. Akuntabilitas, dimana dengan indikator ini untuk melihat seberapa tingkat kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang dipilih rakyat, sehingga dapat dilihat seberapa besar konsistensi dari kebijakan dan kinerja birokrasi publik terhadap kehendak publik. Akuntabilitas BPBD Kabupaten Badung telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. BPBD Kabupaten Badung melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Bupati dengan melampirkan LAKIP BPBD Kabupaten Badung setiap tahunnya. Sehingga dari segi akuntabilitas BPBD Kabupaten Badung tergolong baik. Dari pemaparan di atas maka dapat dinyatakan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2014 dapat dikategorikan cukup baik. Tingkat produktivitas dalam merealisasikan rencana kerja tahun 2014 juga tergolong cukup tinggi. Jadi secara garis besar, BPBD Kabupaten Badung telah berhasil mencapai kinerja yang cukup memuaskan sehingga tujuan mengurangi resiko bencana di Kabupaten Badung telah tercapai.

6. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Evaluasi Kinerja di BPBD Kabupaten Badung secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah

Kabupaten Badung di setiap akhir tahun anggaran. Dilihat dari segi indikator kinerja yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, BPBD Kabupaten Badung dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di tahun 2014 dapat dikatakan telah berhasil dengan kinerja yang cukup memuaskan. Namun hal tersebut di atas masih memerlukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap segala program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di tahun 2014, BPBD Kabupaten Badung tentu saja menemui faktor pendukung. Adapun Faktor pendukungnya yaitu mendapat kemudahan dari Pemerintah Kabupaten Badung, karena Program Penanggulangan bencana menjadi program unggulan nomor 5 (lima) di Kabupaten Badung, Terjalannya kerja sama dengan beberapa pihak swasta seperti hotel dan industri pariwisata lainnya yang dapat membantu dalam hal lokasi evakuasi secara vertikal. Hal yang mendukung lainnya adalah fungsi BPBD Kabupaten Badung itu sendiri. Fungsinya adalah sebagai Komando, Koordinasi dan Pelaksana, sehingga apabila dalam upaya penanggulangan bencana BPBD dapat mengarahkan dan memimpin instansi pemerintahan lainnya untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Kinerja BPBD Kabupaten Badung juga menemui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, diantaranya seperti belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kinerja dan masih belum optimalnya koordinasi yang terjalin antara stakeholder yang ada baik dari masyarakat, instansi pemerintah lainnya maupun dari pihak swasta. Walaupun sudah terjalin hubungan yang baik di beberapa aspek, namun hal tersebut perlu ditingkatkan baik dari segi koordinasi maupun kesadaran bersama untuk mendukung pengurangan resiko bencana di wilayah Kabupaten Badung.

Maka dari itu kedepannya dalam hal upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Badung diharapkan peran serta seluruh masyarakat dari berbagai aspek dapat terus mendukung upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung. Serta diharapkan pula kinerja BPBD Kabupaten Badung sendiri dapat terus ditingkatkan agar dapat mewujudkan Badung yang mandiri dan tangguh bencana sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irham, Fahmi. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama
- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Persons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Priansa, Donni Juni & Suwanto. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- P. Siagian, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rianto Rahadi, Dedi. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Ruky, Achmad. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja: Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: Gramedia
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.